

## PEMBUKAAN

NOTULENSI		
<b>SUBJECT:</b> Pengantar tentang Panduan Praktis NUA Buku 3 Kebencanaan dan Lingkungan		
<b>DATE OF MEETING</b> Jumat, 29 Maret 2019	<b>PLACE OF MEETING</b> Ruang Aula Lantai 23 Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat	<b>MC</b> Chyntia Jasmine
<b>GUEST SPEAKERS</b> 1. Oswar Mungkasa Deputi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 2. Wicaksono Sarosa Ruang Waktu/Kemitraan Habitat 3. Vera Asisten Deputi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup		<b>ATTENDANTS</b> (Lihat daftar hadir peserta)
Agenda: 1. Menjelaskan konsep New Urban Agenda 2. Menjelaskan isi buku Panduan Praktis NUA tentang Kebencanaan dan Lingkungan 3. Konteks Panduan Praktis NUA 3 di DKI Jakarta		

ITEMS	PERSON	POINTS OF MEETING
	Sesi Pembuka Oswar Mungkasa	<p><b>Pengantar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana hubungan MDGs dan SDGs? MDGs tidak memiliki elemen yang berkaitan dengan perdamaian dan keadilan serta kesejahteraan, sedangkan MDGs dan SDGs memiliki kesamaan dalam tiga aspek, yaitu: masyarakat, lingkungan, dan kemitraan. Selain aspek – aspek kandungan dari dokumen global tersebut, MDGs hanya mengandung target-target saja.</li> <li>• Urbanisasi yang terjadi di Jakarta terjadi karena ada dua hal, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Kedua faktor-faktor ini yang sudah seharusnya direspon dan ditangani dengan baik oleh pemerintah Jakarta sehingga tercipta keterkaitan desa-kota yang lebih baik, sehingga tidak menjadi beban bagi Jakarta.</li> </ul>
	Sesi Pembuka Wicaksono Sarosa	<p><b>Pengantar: Panduan Praktis Implementasi NUA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indonesia sangat aktif dalam proses penyusunan dan implementasi New Urban Agenda (NUA), sehingga akan sangat disayangkan apabila Indonesia tidak menterjemahkannya dan tidak terlibat aktif dalam melaksanakannya.</li> <li>• Salah satu prinsip penting dalam NUA adalah “kota bagi semua”. Siapakah yang disebut dengan “semua”? Kota tidak hanya untuk</li> </ul>

ITEMS	PERSON	POINTS OF MEETING
		<p>orang-orang yang mampu membeli tanah dan ekonomi berkecukupan, tetapi juga kaum disabilitas, orang tua, serta generasi muda, sehingga sesuai dengan prinsip keberlanjutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan dari diskusi ini adalah ingin melihat bagaimana konten buku ini bisa sesuai dengan konteks kota Jakarta.</li> </ul>
	<p>Sesi Pembuka Vera Assisten Deputi Tata Ruang</p>	<p><b><u>Pengantar: Jakarta Sebagai Kota yang Berketahanan dan Responsif terhadap Perubahan Iklim</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas lautan Jakarta lebih luas daripada luas daratannya.</li> <li>• Secara geografi, Jakarta merupakan muara dari 13 sungai dan sebagian besar daratannya berada di bawah permukaan laut dan mengalami penurunan muka tanah yang disertai dengan pasang air laut yang semakin meningkat akibat pemanasan global.</li> <li>• Tantangan dalam bidang tata ruang yang turut berkontribusi pada kondisi Jakarta adalah perubahan tata guna lahan yang tidak terkontrol di bagian hulu (kota Bogor).</li> <li>• Dalam menangani masalah banjir di Jakarta, pemerintah telah melakukan beberapa upaya, di antaranya upaya pengendalian banjir dengan menyediakan dan membangun infrastruktur fisik, penyediaan air minum, dan pengelolaan air limbah.</li> <li>• Kebijakan penanggulangan bencana di Jakarta dapat dibagi menjadi dua: pra bencana dan tanggap darurat.</li> <li>• Upaya dan target jangka menengah (5 tahun) Jakarta: <ul style="list-style-type: none"> <li>- naturalisasi dan normalisasi sungai,</li> <li>- pembangunan tanggul di pesisir pantai,</li> <li>- pengelolaan sampah dengan pembangunan ITF, salah satunya ITF Sunter,</li> <li>- mengoptimalkan di TPST Bantar Gebang,</li> <li>- pembangunan Taman Maju Bersama di beberapa lokasi,</li> <li>- pengembangan Transit-Oriented Development (TOD).</li> </ul> </li> </ul>

## DISKUSI KELOMPOK 1

NOTULENSI		
<b>SUBJECT:</b> Diskusi Sub-Komponen C dari Panduan Praktis NUA Buku 3 Kebencanaan dan Lingkungan		
<b>DATE OF MEETING</b> Jumat, 29 Maret 2019	<b>PLACE OF MEETING</b> Ruang Aula Lantai 23 Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat	<b>MC</b>
<b>CO-FASILITATOR</b> 1. Nurulitha (Ruang Waktu) 2. Angga (Jakarta Berketahanan)		<b>PESERTA</b> (Lihat daftar hadir peserta)
Agenda: 1. Menggali isu, pilihan kebijakan/aksi terkait Sub-Komponen C Buku 3 Panduan Praktis NUA		

ITEMS	PERSON	POINTS OF MEETING
C.1.1	Fasilitator	<ul style="list-style-type: none"> <li>Di Buku 3, salah satu komponen yang dibahas adalah bencana. DKI sendiri termasuk yang menarik untuk dibahas terkait kebencanaannya. Dulu gempa di Lebak, sempat sampai di DKI dan kita bingung harus bagaimana. Kita rentan terpapar bencana namun bagaiman kita sebagai masyarakat, apakah sudah siap.</li> <li>Dalam pembahasan kelompok ini, pada bagian pertama akan ada 3 isu: Bagaimana strategi Jakarta mengurangi resiko, Bagaimana masyarakat proaktif dan siap bisa membantu mengurangi resiko bencana, serta Dampak perubahan iklim dan bagaimana dki merespon.</li> <li>Disini kita minta bantuan semua sebagai nasumber untuk membantu mengisi pilihan kebijakan apa saja, apakah ada yang cocok, apakah ada yang tidak bisa. Jadi kita minta bantuan menerjemahan, ini kan dari NUA kita minta bantuan agar lebih implementatif di DKI</li> <li>Kita mulai dari isu pertama, C1 tentang pengembangan strategi risiko bencana. Dapat dilihat di pilihan kebijakannya yang pertama, C.1.1 Penilaian berkala terhadap risiko bencana, maksudnya adalah apakah kita harus punya peta kerawanan dan harus diupdate secara berkala. Apakah sudah ada?</li> </ul>
C.1.1	BNPB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebelumnya saya ingin membahas dari sisi nasional dulu. Tindak lanjut dari UU 23 tentang Pemda, sudah ada PP 2/2018 tentang standar pelayanan minimal. Jadi sebenarnya sudah ada urusan yang wajib terpenuhi tentang penanggulangan bencana.</li> <li>Selanjutnya dalam Permendagri 101/2012 dijelaskan pelayanan dasar terkait kebencanaan ada 3 yang harus ada di kabupaten/kota: pelayanan informasi rawan bencana minal daerah tersebut punya kajian risiko bencana, pelayanan kesiapsiagaan minimal punya rencana penanggulangan bencana selama 5 tahun, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi</li> <li>Jadi sebenarnya aturan kebencanaan itu sudah cukup bagus. Tinggal bagaimana kota ini melanjutkan.</li> <li>Juga di UU 24/2007, sebenarnya sudah ada kajian-kajian framework yang sudah disusun selama ini, jadi teman-teman NUA bisa lanjuta dari apa yang sudah dilaksanakan selama ini.</li> </ul>

ITEMS	PERSON	POINTS OF MEETING
	BPBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan strategi risiko bencana sudah ada memang tapi harus diperbaiki tidak hanya UU 24/2007.</li> <li>• Masukan dulu SPMnya, kalau masuk kita pasti buat. Kalau tidak sesuai SPM, ya kita tidak melaksanakan.</li> <li>• Selain itu mau menanggapi bahwa konteks NUA ini harus sesuai konteks Jakarta. Misal itu di poin 4 (pengamanan kawasan tepian pantai) itu tidak relevan karena risiko bencana di Jakarta justru banjir, kebakaran, dan ancaman gempa, bukan ke pesisir. Kalau di BPBD, ada 8 dimensi ancaman bencana di DKI dan yang prioritas itu 4: banjir, kebakaran, gempa, dan angin kencang.</li> <li>• Mau menanggapi poin 5 (Peningkatan kapasitas pemerintah daerah) juga. Tidak hanya meningkatkan kapasitas Pemda, karena masyarakat juga bisa jadi korban, pelaku, dan pengurang risiko. Jadi yang perlu ditengahkan adalah masyarakat dan pemda.</li> <li>• Untuk poin 1 (penilaian berkala terhadap risiko bencana) dan 2 (menyediakan jalur evakuasi dan ruang evakuasi yang memadai) nanti ikuti saja dari SPM Permendagri 101/2012. Jangan lagi kita buat kata-kata dewa yang tidak dapat diimplementasikan. Harus lebih jelas dan konkrit, misal mengurangi efek rumah kaca melalui pembangunan Gedung-gedung ramah lingkungan, atau misal apa melalui apa.</li> <li>• Menambahkan, ada yang perlu ditekankan dalam pengembangan strategi pengurangan risiko bencana yaitu kebijakan. Kebijakan analisis risiko bencana sebenarnya ada di Pemda, namun ketika suatu daerah memiliki kawasan strategis, maka tidak dapat terakomodasi pemda. Jadi usulannya adalah kebijakan yang mohon dibuat Nasional Makro.</li> <li>• Intinya poin 1 dan 2 bisa dari SPM. Kalau poin 3 (menerapkan prinsip pembangunan yang berketahanan), kata kata dewa seperti itu harus disingkirkan agar mudah dikerjakan, dimensinya harus jelas.</li> </ul>
	Fasilitator	Ya, pak. Kalau di poin 3 itu sebenarnya kearah konstruksinya
	BPBD	Iya, seharusnya dijelaskan seperti itu
		DKI memang sudah punya rencana penanggulangan bencana daerah di Pergub 143/2013 tapi itu untuk tahun 2015-2019, jadi sudah expired harus dibikin lagi.
	CIPTA KARYA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk mengomentari penanggulangan bencana berbasis masyarakat dan bukan hanya oleh pemerintah, kami kebetulan sedang menggiatkan suatu program terkait permukiman kumuh. Ada juga Peraturan Menteri PUPR untuk peran masyarakat di level yang operasional. Yang sudah kami lakukan adalah peningkatan kualitas permukiman kumuh. Hal ini dikarenakan permukiman kumuh dan kota Tangguh memiliki dasar yang sama seperti sanitasi, kepadatan penduduk, RTH, aksesibilitas, dll, hampir sama untuk 7 kriteria permukiman kumuh dengan kota Tangguh.</li> <li>• Dengan demikian, kegiatan terkait permukiman kumuh sudah kita lakukan. Selain itu sudah ada pilot berbasis masyarakat di lingkungan kumuh, sudah ada aspek pengurangan risiko bencana Bersama masyarakat. Kita juga sudah menyiapkan antisipasi, udah mencerdasakan potensi apa saja yang mungkin terjadi khususnya di kalangan permukiman kumuh, kemudian juga Bersama menyusun rencana atau apa yang bisa dilakukan Bersama masyarakat.</li> </ul>
	Fasilitator	Itu di DKI pak?

ITEMS	PERSON	POINTS OF MEETING
	Cipta Karya	Belum launching sih, tapi untuk yang berbasis masyarakat ada di 6 kota seperti Padang, Lampung, Gresik, Sidoarjo
C.1.4	Karina	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menanggapi tadi poin C.1.4 tentang pengamanan pantai yang kurang relevan di Jakarta. Oleh karena itu mungkin bisa disesuaikan “Kawasan yang berisiko” di Jakarta, bukan hanya yang di tepi pantai.</li> <li>• Untuk rencana risiko, jadi sekarang Indonesia punya rencana yang sampai tahun 2045, kajian risikonya kalau bisa ada measurement yang tepat pasti akan menarik untuk pilihan aksi di pemda.</li> </ul>
	Cipta Karya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oh iya menambahkan yang tadi, di dalam menangani permukiman kumuh, jelas bisa dilihat bahwa potensi bencana lokalnya itu akan sangat rentan, karena kepadatannya tidak memenuhi syarat. Hal ini menyebabkan permukiman kumuh rentan di kota. Jadi ketika kita menangani permukiman kumuh, hal itu bisa membantu dalam menangani kerentanan, bisa menjadi upaya pencegahan.</li> <li>• Selain menerbitkan standar teknis, harus ada unsur perizinan, pendampingan, dan pemberian informasi terhadap masyarakat. Jadi penerbitan standar teknis, perizinan harus ditekankan.</li> <li>• Kami di KOTAKU juga memiliki program diantaranya teknis informasi seperti masyarakat bangunan tahan gempa di perkotaan, siaga menghadapi gempa.</li> </ul>
	Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Kementerian ATR/BPN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menanggapi kawasan strategis tadi, kami tahun 2018 memang konsen ke PSN. Di dalamnya menyusun ISDAL terdiri dari PZ, insentif disintesis, mekanisme perizinan, sampai ke sanksi.</li> <li>• Ada beberapa kawasan seperti koridor Kereta Api Cepat, ISDAL PZ di sekitar Bandara Soekarno Hatta, Jalan Tol Jakarta-Merak, Jalan Tol Jakarta-Cikampek, itu yang akan dilakukan di 2019.</li> <li>• Itu berupa dokumen teknis ISDAL, tapi ada juga materi teknisnya.</li> <li>• Itu skala 1:5000 jadi jakartanya bisa terpetakan di PZ nya.</li> </ul>
	PPAPP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saya ikut rapat BPBD, ada 50 kegiatan yang melibatkan masyarakat. Semua SKPD dan kelurahan yang memiliki risiko bencana terbanyak diundang untuk kemudian memberitahukan ke masyarakat atau komunitas cara menghadapi atau apa yang dilakukan ketika bencana terjadi. Jadi program yang melibatkan masyarakat sudah ada.</li> <li>• Kemudian saya pernah rapat lagi dengan TAPEM. Ada Gerakan Cegah Bencana Kebakaran. Jadi ada 19 peta bencana kebakaran, semua terpetakan di DKI, akan dicatat kelurahan mana yang rawan dan mana yang tidak akan diberi stiker, jadi pemerintah sudah mulai menanggapi bencana terutama kebakaran. Karena di DKI 61% bencana adalah kebakaran.</li> <li>• Selain itu, ada dari PUPR, kita sudah melakukan program mengenai IPAL Komunal 2015-2018 untuk masyarakat kumuh. Rencananya tahun ini akan ada 18, namun berlanjut atau tidaknya tergantung pemerintah. Jadi sebenarnya masyarakat sudah banyak berpartisipasi.</li> </ul>
	ATR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tambahan untuk kawasan strategis, selain jalan tol, ada Kali Cileunyi. Kami mengupayakan badan air agar menjaga sesuai fungsinya, mengembalikan fungsi bantaran sungai.</li> <li>• Sedang diupayakan Perda pengendalian, dan sudah ada draft rapermen untuk penataan kawasan sempadan danau.</li> <li>• Kalau kembali ke konteks yang berketahanan, seperti yang sudah disebut</li> </ul>

ITEMS	PERSON	POINTS OF MEETING
		tadi ada instrument lokal PZ di sekitar PSN Kereta Api Cepat. Kalay yang akan disusun yaitu Jalan Tol Jakarta-Merak, Jakarta-Cikampek, Soetta, dan Kali Ciliwung.
	Fasilitator	Mau mengingatkan ada isu yang belum banyak dibahas yaitu C.1 poin 5 yang meningkatkan kapasitas Pemda
		Pergub 143/2013 sudah menyinggung untuk gerakan cegah kebakaran, jadi pemerintah sudah bekerja untuk hal itu. Sekarang sedang dibuat InGub. Ada 19 kelurahan yang rawan kebakaran.
		Untuk badai, harus ada terkait penyediaan peringatan dini berupa sistem.
	Fasilitator	Jadi apakah ada cerita tentang Early Warning System di Jakarta?
		Kalau banjir sudah ada, itu di kali-kali sudah ada
	Karina	Sepertinya selain peringatan dini, ada perlunya juga aksi dini
	WVI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebelumnya saya mau koreksi, Pergubnya 143/2015 bukan 2013</li> <li>• Saya juga mau menambahkan redaksi "Pengamanan kawasan vital berisiko" karena seperti yang dibahas banyak kaitannya dengan ekonomi jadi lebih baik ada istilah vitalnya.</li> <li>• Saya ingin saran mungkin adanya Business Continue Plan untuk masing-masing industri. Hal ini terkait dengan apabila terjadi suatu bencana maka bagaimana rencana suatu industri. Hal ini juga bisa dibuat lingkup kawasan misal SCBD, kita terkena gempa, mau seperti apa, dipindahkan kemana, dsb</li> </ul>
C.2	BPBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saya saran pilihan kebijakan diperbaiki agar lebih konkrit.</li> <li>• Kemudian kalau boleh saya mau bicara C.2, pendekatan itu bukan berbasis masyarakat tapi masyarakat setempat.</li> <li>• Yang pertama, pilihan kebijakannya "Mengkolaborasikan Masyarakat Setempat dalam Hal Penyelenggaraan Pra, Saat, dan Paska Bencana"</li> <li>• Jadi besok kedepan pra, saat, dan paska bisa berbasis masyarakat setempat.</li> <li>• Jadi di Pra itu contohnya: kesepakatan simulasi, kesepakatan kawasan evakuasi bersama, kesepakatan pembentukan tim siaga, kesepakatan simulasi bersama</li> <li>• Di pascanya, kesepakatan tim psiko sosial, di sini bisa melibatkan ibu-ibu setempat karena yang bisa menghibur anak-anaknya ya ibu-ibunya sendiri, buka orang dari Jawa Timur tiba tiba ke sana menghibur.</li> <li>• Jadi peran Pemda adalah kurangi bencana bersama, selesaikan bersama, kurangi dan buat baik bersama, jadi kalau bisa menyelenggarakan dengan partisipasi masyarakat setempat ketika pra, saat, dan paska masa semua bisa selesai.</li> <li>• Jadi jangan bikin tidak konkrit, karena kebijakan ini akan sulit. Ketika disampaikan ke pemerintah tidak akan sampai.</li> </ul>
	Fasilitator	Terimakasih pak, sebenarnya mungkin itu nanti bisa dimasukan ke pilihan aksi, karena nantinya pilihan aksi akan lebih detail dari pilihan kebijakan. Jadi konkritnya akan jadi pilihan aksi.
	BPBD	Karena kalau di UU 24/2007 itu ada pra, saat, paska, kalau seperti ini takutnya lari-lari.
C.2 dan C.3	Karina	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk C.2 (penggunaan pendekatan proaktif berbasis risiko dan masyarakat) nanti akan ada PMI dan BPBD yang saat ini sedang membuat grand design penggunakan bencana berbasis komunitas, bisa jadi pilihan kebijakan.</li> </ul>

ITEMS	PERSON	POINTS OF MEETING
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk C.3 (aksi iklim di semua tingkatan), ini kita lihat aksi iklim, apakah akan lebih menarik juga bukan hanya aksi iklim tapi dari mitigasi, adaptasi, dll juga disebutkan semua. Takutnya ini hanya berkaitan dengan perubahan iklim saja, tidak ada kaitannya dengan bencana lainnya.</li> </ul>
	Fasilitator	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk C3 ini memang fokus untuk mengurangi GRK (gas rumah kaca)</li> <li>Untuk konteks DKI, saya sekilas membaca informasi ada RAD GRK tapi kalau RAD API (adaptasi perubahan iklim), yang GRK pun agak lama sepertinya karena nama dinasnya masih BPLHD.</li> <li>Atau ada tambahan? Bagaimana Jakarta mengurangi GRK, beradaptasi pada perubahan iklim?</li> </ul>
	PPAPP	Sepertinya tidak ada dinasnya
	Fasilitator	Iya, tapi mungkin dari setiap instansi bapak ibu ada program yang mengaddress masalah perubahan iklim ini? Misal kampung iklim atau apa dari bapak ibu SKPD atau PD lain
	PPAPP	Paling kemarin kamu dapat dari KPKP menghasilkan bibit hidroponik 37 dan 44 RPTRA. Kita pemberdayaan sering dikasih bibit hidroponik. Ada juga alat untuk mendeteksi polusi udara dari PRTRA yang Kalijodo sama Terminal.
C.1	BNPB	Untuk C.1 (penilaian berkala risiko bencana) kami di tingkat nasional punya indikator, kita pakai dua untuk Kota: IKD dan Tools (tidak tercatat namanya), jadi itu bisa dipakai, itu setiap tahun. Kalau yang untuk kota yang (tidak tercatat Namanya) itu dipakai setiap tahun secara nasional oleh kota yang punya BPBD.
C.3	CIPTA KARYA	Untuk C.3, apakah bisa menggunakan solar cell? Kami menyarankan lokasi-lokasi untuk solar cell
C.3.1 dan C.1	PETABENCANA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mau mengomentari C.3 poin 1 (membangun ketahanan dan mengurangi emisi gas rumah kaca) menurut pemahaman saya itu adalah hal yang berbeda. GRK indikatornya ada banyak, jadi sebaiknya diskusi kita mengarah ke suatu goals, mau mengurangi GRK atau membangun ketahanan karena kalau membangun ketahanan berarti tidak ada part mengurangi. Jadi lebih baik dipisah.</li> <li>Untuk poin C.1 bagian evakuasi, kajian mengenai ini tergantung mau diterapkan di kota mana. <i>Lesson learnt</i> kita dari riset kalau di setiap daerah bencananya akan beda, dan untuk menentukan jalur dan ruang evakuasi juga beda tergantung bencananya, adaptasinya juga beda. Misal di DKI banjir 1 meter biasa, tapi di tempat yang tidak biasa banjir pasti lumpuh. Karena beda beda karakter itu jadi saya sepakat dengan tadi dari BPBD bahwa lebih baik kita berangkat dari masyarakat dan kita yang mengikuti mereka.</li> </ul>
	Fasilitator	Kalau ikut masyarakat juga lebih sustainable ya
	PETABENCANA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk jalur dan ruang, biasanya ketika bencana itu sistemnya bukan yang sudah terorganisir tapi lebih ke sporadik, jadi tempat yang ada aja. Yang udah punya sampai level path adalah Australia. Indonesia belum. Itu pun Australia baru untuk gempa. Banjir belum.</li> <li>Untuk banjir, DKI sendiri baru blok perbatas kecamatan unit terkecil yaitu RW. Nantinya kalau mau mengambil untuk menghitung jalur mana dan ruang mana, kita butuh analisis tren bencana dan ketersediaan overlay jalan, dll. Sekarang sih sudah jauh lebih baik informasi secara rinci namun masih butuh informasi yang lebih detail. Karena data sejauh ini masih blok RW yang tersedia area padahal jalur evakuasi butuh line dan ruang</li> </ul>

ITEMS	PERSON	POINTS OF MEETING
		<p>evakuasi butuh titik, dengan demikian seakan-akan jalan semua disitu terblok tidak dapat digunakan untuk evakuasi. Jadi saya setuju dengan pendekatan masyarakat setempat sebagai peran utama, dan mereka sebagai sensor untuk mengenerate seperti apa dan harus bagaimana.</p>
C.1.1 C.1.2		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada satu miss antara C.1.1. (penilaian berkala terhadap risiko bencana) dan C.1.2 (menyediakan jalur evakuasi dan ruang evakuasi yang memadai). Ketika risiko ada, ektika ada message lain yang muncul penggulungan bencana atau</li> <li>• Perlu ada kebijakan aksei RPB dan RENKON, termasuk SOP</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasus DKI sudah ada Renkon. Kalau banjir sudah ada 64 kelurahan, kalau masalah menyediakan jalur evakuasi bisa banyak teknologi di situ.</li> <li>• Kenapa kita tidak taruh goalsnya kemana, agar arahnya lebih spesifik, indikator apa, aksi bagaimana</li> <li>• Untuk evakuasi, bapak ibu pasti sudah familiar dengan google maps atau waze, sistemnya sama, pakai manusia tapi manusia digital</li> <li>• Tapi minusnya adalah kita tidak tap in untuk bikin evacuation road karena itu kan dari google, dari usernya, jadi ada masalah privacy data, dll. Masalah keterbukaan informasi. Selain itu ada masalah juga tentang informasi, itu kan ngetracknya via aplikasi, tidak ada survei lanjutan sehingga yang dibaca murni big data dari akun googlenya. Selain itu bisa jadi mis interpretasi karena misal di waze tidak ada macet karena jalannya ditutup, tidak ada yang lewat sehingga seakan akan tidak ada macet. Akan beda interpretasinya. Itu salah satu pertimbangan tidak menghitung jalur pakai waze.</li> <li>• Untuk kami kemarin yang terakhir dilakukan menggunakan data titik bukan hanya area tapi ketika mengakses informasi tersebut ada yang diambil dari apakah saya akan selamat kalau belok kanan.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saya mau mengingatkan bahwa banyak kebijakan yang sifatnya regular namun tidak dikerjakan, contohnya RPB sudah mau expired, ada Renkon tapi terakhir dibuat 2017, ada keluarhaan juga seingat saya tapi 2 tahun lalu. Jadi hal ini expired semua. Kalau kebijakan expired semua, ya tidak akan berhasil.</li> <li>• Usulan konkrit di tim internal, kebijakan yang sudah ada apa untuk pemangku kebijakan untuk mengeluarkan kebijakan strategis seperti ini. Bagaimana bisa dipetakan untuk disambungkan dengan dinas yang lain.</li> </ul>
C.2.4	Karina	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk C.2.4. terkait dengan asuransi bencana, kita ada banyak praktik asuransi seperti ACA, dll namun sekarang untuk bencana yang masih berlaku adalah asuransi kebakaran. Namun saya mengusulkan apakah sudah ada mekanisme tertentu yang ada di pemerintah misal premi asuransi oleh pemerintah. Micro insurance juga tidak banyak.</li> <li>• Kemudian menambahkan, entah expired atau belum, 2013 pada saat banjir Jakarta kita punya peta Jakarta yang selalu terupdate dengan twitter pada saat itu dan saat itu langsung muncul.</li> </ul>
	PETABENCANA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Itu dilanjutkan, tapi skalanya sekarang lebih besar. Untuk Jakarta sampai tahun 2016/2017, sekarang berkembang ke Jabodetabek, Semarang, Bandung. Sekarang nasional ada di PETABENCANA, ini real time.</li> <li>• Bencana di real time menghasilkan sesuatu yang sporadis. Karena update bencana itu paling cepat 2 jam setelah bencana, misal air, airnya udah</li> </ul>



ITEMS	PERSON	POINTS OF MEETING
		<p>gatau kemana. Kita sekarang ditahap mensosialisasikan. Sekarang PETABENCANA opensource punya fitur di beberapa media sosial juga, jadi kita yang harus beradaptasi dengan masyarakat. Ketika terjadi emergency, tools yang mereka buka adalah hal yang bisa mereka gunakan yaitu chat atau apps, jadi kita manfaatkan itu. Kita yang harus bisa seadaptif mungkin, jangan sampai membuat apps baru karena akan membingungkan masyarakat yang sudah biasa membuka aplikasi atau chat tertentu. Sejauh ini kita bekerjasama dengan BPBD, pernah 2017 saat server BPBD down, jadi informasi terkini bencana menjadi lambat, jadi autodirect ke PETABENCANA. Kita tidak mau membuat masyarakat download apps atau mikir kuota saya gimana, jadi kita ambil langsung dari chat dan apps yang ada.</p>

## DISKUSI KELOMPOK 2

NOTULENSI		
<b>SUBJECT:</b> Diskusi Sub-Komponen D dari Panduan Praktis NUA Buku 3 Kebencanaan dan Lingkungan		
<b>DATE OF MEETING</b> Jumat, 29 Maret 2019	<b>PLACE OF MEETING</b> Ruang Aula Lantai 23 Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat	<b>MC</b>
<b>CO-FASILITATOR</b> 1. Mas Chasan (KARINA) 2. Abdullah (Jakarta Berketahanan)		<b>PESERTA</b> (Lihat daftar hadir peserta)
Agenda: 2. Menggali isu, pilihan kebijakan/aksi terkait Sub-Komponen D Buku 3 Panduan Praktis NUA		

POIN	POINTS OF MEETING
D1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masukan untuk poin D1.1 mengenai analisis dampak dan kerentanan bencana maupun perubahan iklim. Analisis ini sebaiknya jangan hanya dilakukan pada tingkat kota saja, tapi perlu dilakukan berjenjang bahkan sampai ke tingkat kelurahan. Hal ini dikarenakan variasi kondisi dan isu yang terjadi di DKI Jakarta sangatlah luas. Isu yang terjadi pada Jakarta Pusat belum tentu sama dengan Jakarta Utara, apalagi Kepulauan Seribu. Oleh karena itu, pilihan kebijakan/aksi pada poin D1 harus diubah menjadi tingkat provinsi, kota/kabupaten, dan juga kelurahan.</li> <li>Aksi-aksi yang dilakukan pun harus praktis dan dapat diterapkan segera pada tingkat terendah, yaitu kelurahan.</li> <li>Masukan untuk poin D1.2, sebaiknya dibuat menjadi lebih luas dan tidak terbatas hanya pada transportasi. Usulannya, kalimat pilihan kebijakan/aksi diubah menjadi “mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan pada berbagai sektor.” Dengan demikian, hal ini akan mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan energi terbarukan tidak hanya untuk transportasi, tapi juga perumahan dan bangunan gedung. Hal ini juga perlu dikaitkan dengan promosi gaya hidup ramah lingkungan, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya yang menerapkan bus berbayar dengan sampah plastik.</li> <li>Masukan untuk poin D1.3, sebaiknya analisis dan perencanaan mengenai kebencanaan yang juga terkait dengan poin D1.1 tidak hanya dilakukan atau berfokus kepada kaum rentan saja, melainkan harus berbasis kawasan. Hal ini disebabkan banyak kawasan-kawasan yang ada di DKI Jakarta, contohnya CBD, terdiri dari berbagai keluarahan. Dengan adanya lintas batas administrasi seperti ini, maka sebaiknya analisis dan perencanaan pun dilakukan dengan pendekatan kawasan, selain menargetkan kelompok rentan.</li> <li>Dalam melakukan pendekatan kawasan pun, perlu dipilih kawasan-kawasan yang menjadi prioritas dalam hal kerentanannya serta nilai yang diberikan oleh kawasan tersebut bagi Jakarta secara keseluruhan. Jadi, selain kawasan yang rawan bencana juga kawasan-kawasan yang memiliki <i>economic lost</i> yang besar apabila terjadi bencana pada kawasan tersebut.</li> <li>Hal yang sudah dilakukan di Kelurahan Grogol Selatan dalam melindungi kaum rentan danantisipasi bencana adalah pelatihan bagi masyarakat mengenai tindakan yang harus dilakukan</li> </ul>

POIN	POINTS OF MEETING
	<p>apabila terjadi bencana, membentuk kelompok cepat tanggap darurat, serta membuat peta daerah rawan bencana pada tingkat kelurahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selain itu, yang perlu ditambahkan juga dalam poin D1 ini adalah adanya sistem data/informasi yang berbasis masyarakat dan data-data yang dikeluarkan oleh berbagai institusi pemerintah harusnya terintegrasi. Pasalnya, sering terjadi data yang dikeluarkan oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan BPS (Badan Pusat Statistik) tidaklah sinkron.</li> <li>• Data-data sekiranya harus dimuat adalah data mengenai jumlah kaum rentan dan jumlah kawasan rentan serta lokasinya.</li> <li>• Data-data yang ada ini juga seharusnya bisa di-sinkron-kan dengan menggunakan teknologi informasi serta harus berbasis kepada riset agar lebih akurat.</li> <li>• Hal yang terjadi saat ini adalah penanganan kebencanaan yang masih sangat berpusat kepada BPBD, padahal urusan kebencanaan tidak hanya tanggung jawab satu lembaga melainkan semua lapisan masyarakat. Bencana akan lebih mudah diatasi dan jumlah korban dapat diatasi apabila masyarakat juga mampu tanggap terhadap bencana yang ada. Dengan demikian, perlu ada 1 poin yang ditambahkan mengenai perluasan peran aktor, termasuk kelurahan, organisasi masyarakat, bahkan akademisi / universitas.</li> </ul>
D2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poin D2.1 sebaiknya tidak hanya membicarakan mengenai bencana tetapi juga dampak perubahan iklim.</li> <li>• Pendekatan holistik yang dimaksudkan di sini harus diperjelas. Holistik itu sebaiknya lintas sektor (tidak hanya berpusat pada satu badan, BPBD) dan harus lintas tingkat pemerintahan dan lapisan masyarakat.</li> <li>• Pendekatan holistik ini juga perlu dilakukan bahkan dari rumah, tingkat keluarga. Keluarga harus dapat menjadi agen yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kebencanaan dan perubahan iklim, karena dampak buruk hanya bisa diatasi melalui hal yang kecil. Pendidikan di sekolah pun juga penting.</li> <li>• BPBD memiliki program: 'Madrasah Tanggap Bencana', yang bekerja sama dengan beberapa sekolah di Jakarta. Hanya saja teman-teman dari BPBD lah yang masih menjadi agen perubahan ini, ke depannya sedang diusahakan bahwa guru-guru sekolah yang mampu menjadi agen perubahan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kebencanaan.</li> <li>• Poin D2.2 sebaiknya diubah karena diperlukan juga mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi tentang ketahanan kota dan kebencanaan kota, tidak hanya pemantauan, penilaian, dan pelaporan. Sayangnya, Jakarta tidak memiliki Perda yang terkait dengan kebencanaan, sehingga mekanisme-mekanisme ini masih belum jelas.</li> <li>• Hal yang juga perlu ditambahkan pada poin D2 adalah mengenai pemberian insentif bagi para "local champion", seperti bapak lurah Grogol Selatan ini. Dengan adanya pemberian insentif tentunya dapat membuka peluang replikasi bagi usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Grogol Selatan di daerah-daerah lain di Jakarta, serta memotivasi champion-champion lainnya untuk melakukan inovasi.</li> <li>• Hal yang paling sulit biasanya terdapat di lokasi perumahan ekonomi menengah dan atas, karena pada umumnya mereka memiliki sumber daya tambahan atau cadangan, sehingga</li> </ul>

POIN	POINTS OF MEETING
	<p>apabila terjadi bencana, mereka bisa pindah ke rumah sanak saudara mereka yang berada di wilayah yang tidak terkena dampak bencana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hal juga penting adalah bagaimana penyampaian informasi kepada publik dapat merata, perlu ada Early Warning System di setiap kota. BPBD juga sudah memiliki Call Center Darurat 112, namun call center ini perlu terkoneksi dengan Jakarta Smart City.</li> </ul>
D3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poin D3.1 dapat dilakukan dengan skema pembayaran imbal jasa lingkungan antara Jakarta dan daerah hulu (Bogor). Peralnya, banjir yang terjadi di Jakarta terjadi karena perubahan tata guna lahan yang cukup ekstrim di bagian hulu.</li> <li>• Pembentukan gugus tugas/OPD/ tim koordinasi tingkat provinsi dan/atau kawasan metropolitan juga penting untuk dilakukan agar segera urusan terkait mitigasi dan adaptasi bencana dapat terkordinasi dan terintegrasi dengan baik di bawah satu komando. Gugus tugas ini pun dapat terdiri dari beberapa insitusi terkait yang selama ini telah mengurus isu kebencanaan di daerah.</li> </ul>
D4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencarian skema pembiayaan kreatif di luar APBN dan APBD juga penting dalam rangka mendanai pembangunan infrastruktur yang diperlukan terkait kebencanaan. Hal ini agar tidak membebani anggaran daerah.</li> <li>• Selain itu, anggaran yang terkait dengan kebencanaan sebaiknya terintegrasi dengan RPJMD.</li> </ul>

## PRESENTASI KELOMPOK

NOTULENSI		
<b>SUBJECT:</b> Presentasi Hasil Diskusi Kelompok 1 dan 2		
<b>DATE OF MEETING</b> Jumat, 29 Maret 2019	<b>PLACE OF MEETING</b> Ruang Aula Lantai 23 Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat	<b>MC</b> Chyntia Jasmine
<b>GUEST SPEAKERS</b> 1. Angga (Jakarta Berketahanan) 2.		<b>ATTENDANTS</b> (Lihat daftar hadir peserta)
Agenda: 1. Memaparkan hasil diskusi kelompok yang dilakukan oleh Kelompok 1 dan 2 terkait Kebencanaan dan Perubahan Iklim		

ITEMS	PERSON	POINTS OF MEETING
	Sesi Presentasi Diskusi Kelompok 1 Angga Jakarta Berketahanan	<p><b><u>Pengurangan dan Manajemen Risiko Bencana</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian risiko bencana perlu dilakukan kembali karena data yang sudah ada sudah tidak valid dan sudah terlalu lama.</li> <li>• Pengadaan jalur evakuasi perlu dimasukkan ke dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan penentuan jalur ini perlu diintegrasikan dengan pengumpulan data dari masyarakat (<i>crowdsourcing</i>) melalui aplikasi sosial media yang sudah dipakai oleh masyarakat, sehingga dapat terlihat secara <i>real-time</i> jalur-jalur yang dapat ditempuh saat terjadi bencana.</li> <li>• Pengelolaan kawasan tepi pantai dirasa tidak tepat untuk wilayah Jakarta, melainkan perlu ditentukan kawasan vital beresiko (melihat kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, rawan bencana, dan konsentrasi kaum rentan).</li> </ul>
	Sesi Presentasi Diskusi Kelompok 2 Agung – Lurah Grogol Selatan Aliya – PMI DKI Jakarta	<p><b><u>Kebijakan Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelompok 2 mencoba untuk menambahkan dan melengkapi pilihan aksi dan kebijakan yang sudah ada di dalam buku panduan. Tambahan mohon dilihat pada presentasi diskusi kelompok.</li> </ul>
	Sesi Penutup Oswar Mungkasa	<p><b><u>Penutup</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jakarta sudah mencoba untuk melakukan pendekatan kolaboratif melalui lokakarya seperti ini.</li> <li>• Jakarta sangat mendukung untuk uji coba Panduan Praktis NUA dengan tema yang lain yang sesuai dengan konteks DKI Jakarta.</li> <li>• Mitigasi dan adaptasi kebencanaan akan lebih mudah dihadapi</li> </ul>

ITEMS	PERSON	POINTS OF MEETING
		<p>apabila masyarakat memiliki kesiapan untuk menangani secara mandiri dan tidak menunggu bantuan dari pemerintah: dinas kebakaran.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lokakarya 2 ini lebih baik daripada lokakarya 1.</li></ul>